



POLITIK ISLAM DAN ISLAMISASI DI LAMPUNG: JEJAK KESULTANAN BANTEN DALAM STRUKTUR SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Aris Munandar

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

arism2365@gmail.com

Endang Susanti

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

endangsusanti311@gmail.com

Siti Rohwati

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

sitirohwati8@gmail.com

Abstract :

This research examines the political role of the Banten Sultanate in the Islamisation process in Lampung and its impact on the social and religious structure of the local community. Islamisation in Lampung did not only occur through da'wah, but also through political and economic channels, especially through the pepper trade that established a close relationship between Lampung and Banten. The Sultanate of Banten played a strategic role in strengthening the teachings of Islam by sending ulama, building mosques, and influencing the legal system and local leadership. This research uses the library research method by analysing historical sources, academic journals, and relevant documents. The results show that the Islamic politics of the Banten Sultanate contributed to integrating Islam into Lampung's social and customary systems. The customary leadership structure underwent modification with the increasing role of ulama in decision-making, as well as the integration of Islamic law in customary norms. Islamisation also occurred through cultural acculturation, where local traditions began to be adapted to Islamic values. Islamisation in Lampung is thus not only a religious process, but also a political phenomenon that shapes the social identity of the community to this day.

Keywords: *Islamisation of Lampung, Political Islam, Sultanate of Banten, Social Structure.*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji peran politik Kesultanan Banten dalam proses Islamisasi di Lampung serta dampaknya terhadap struktur sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Islamisasi di Lampung tidak hanya terjadi melalui jalur dakwah, tetapi juga melalui jalur politik dan ekonomi, terutama melalui perdagangan lada yang menjalin hubungan erat antara Lampung dan Banten. Kesultanan Banten memainkan peran strategis dalam memperkuat ajaran Islam dengan mengirim ulama, membangun masjid, serta mempengaruhi sistem hukum dan kepemimpinan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menganalisis sumber-sumber sejarah, jurnal akademik, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam Kesultanan Banten berkontribusi dalam mengintegrasikan Islam ke dalam sistem sosial dan adat Lampung. Struktur kepemimpinan adat mengalami modifikasi dengan meningkatnya peran ulama dalam pengambilan keputusan, serta integrasi hukum Islam dalam norma adat. Islamisasi juga terjadi melalui akulturasi budaya, di mana tradisi-tradisi lokal mulai disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Islamisasi di Lampung bukan hanya proses keagamaan, tetapi juga fenomena politik yang membentuk identitas sosial masyarakat hingga saat ini.

Kata kunci: *Islamisasi Lampung, Politik Islam, Kesultanan Banten, Struktur Sosial.*



PENDAHULUAN

Islamisasi di Lampung merupakan bagian dari proses penyebaran Islam di Nusantara yang berlangsung secara bertahap sejak abad ke-13 hingga abad ke-18.¹ Islam masuk ke wilayah ini melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan, dakwah ulama, serta pengaruh politik dari kesultanan-kesultanan Islam di pesisir barat Sumatra dan Jawa. Sebagai daerah yang memiliki akses strategis terhadap jalur perdagangan Selat Sunda, Lampung menjadi salah satu wilayah yang menerima pengaruh Islam lebih awal dibandingkan beberapa daerah pedalaman lainnya. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Jawa membawa serta ajaran Islam dalam interaksi dagang mereka, yang kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat.² Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam tidak hanya menjadi bagian dari keyakinan religius masyarakat, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, budaya, dan hukum adat yang berkembang di Lampung.

Selain jalur perdagangan, Islamisasi di Lampung juga diperkuat oleh peran politik Kesultanan Banten, yang sejak abad ke-16 menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari pengaruh kekuasaannya. Kesultanan Banten mengirim ulama dan tokoh-tokoh agama untuk menyebarkan Islam di Lampung, sekaligus menjalin hubungan dengan elite lokal guna memperluas jangkauan dakwahnya.³ Peran ulama dalam proses ini sangat signifikan, terutama dalam membangun lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren serta mengajarkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini juga beriringan dengan akulturasi budaya lokal, di mana adat Lampung yang berbasis pada sistem marga dan pepadun mulai mengadopsi nilai-nilai Islam dalam sistem kepemimpinan dan hukum adatnya. Akibatnya, Islam bukan hanya menjadi agama mayoritas di Lampung, tetapi juga menjadi elemen penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakatnya⁴.

¹ Syamruddin Nasution, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

² Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara: Dari Analisis Historis hingga Arkeologis tentang Penyebaran Islam di Nusantara* (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2016).

³ Anisa Yusilafita dan Tapsir Efendi, "Proses Islamisasi dan Penyebarannya di Nusantara," *Jurnal pendidikan Tembusai* 7, no. 2 (2023): 4425–34.

⁴ Muslimin Muslimin, "Kontribusi Ulama dalam Pendidikan Islam dari Masa Ke Masa," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 23, no. 1 (28 Februari 2013), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.12>.

Hubungan historis antara Lampung dan Kesultanan Banten dimulai pada abad ke-16, ketika Banten, di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin, memperluas pengaruhnya ke wilayah Lampung. Salah satu bukti hubungan ini adalah Piagam Kuripan, yang ditemukan di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Piagam ini berisi perjanjian persahabatan antara Banten dan Lampung pada masa kekuasaan Sultan Hasanuddin dan Keratuan Darah Putih. Perjanjian tersebut menandakan adanya hubungan politik dan diplomatik yang erat antara kedua wilayah.

Selain itu, hubungan ekonomi antara Banten dan Lampung juga sangat signifikan, terutama dalam perdagangan lada. Lampung menjadi pemasok utama lada bagi Banten, yang kemudian diekspor ke pasar internasional. Ungkapan tanpa Lampung tak akan ada lada, tanpa lada tak akan ada Banten menggambarkan betapa pentingnya hubungan ekonomi ini bagi kedua wilayah. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga mempererat ikatan sosial dan budaya antara masyarakat Banten dan Lampung.⁵

Selain itu signifikansi politik dalam penyebaran Islam di Lampung sangat erat kaitannya dengan peran Kesultanan Banten sebagai kekuatan politik dan keagamaan di wilayah tersebut. Sejak abad ke-16, Kesultanan Banten tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan lada, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam yang menggunakan jalur politik untuk memperluas pengaruhnya. Melalui pengiriman ulama, perjanjian politik dengan elite lokal, serta integrasi Islam dalam sistem hukum dan pemerintahan, Kesultanan Banten berhasil menjadikan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Lampung. Dengan strategi ini, Islamisasi tidak hanya berlangsung melalui dakwah keagamaan, tetapi juga melalui kebijakan politik yang mengikat masyarakat Lampung dengan struktur pemerintahan Islam.

Dalam hal ini penyebaran Islam melalui jalur politik juga memperkuat posisi Kesultanan Banten dalam menghadapi kekuatan kolonial Eropa, seperti Portugis dan VOC. Dengan menjadikan Islam sebagai simbol persatuan, Kesultanan Banten mampu membangun jaringan politik dengan daerah-daerah di Sumatra, termasuk Lampung. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi Kesultanan Banten sebagai pemimpin

⁵ Elda Harits Fauzan, Abd Rahman Hamid, dan Siti Masykuroh, "Perubahan Hubungan Lampung dengan Banten dalam Perdagangan Lada abad XVI-XVIII," *JAWI* 6, no. 2 (30 Desember 2023): 85, <https://doi.org/10.24042/00202361942100>.

Islam di kawasan tersebut, tetapi juga membantu penyebaran ajaran Islam secara lebih luas. Akibatnya, Islamisasi di Lampung tidak hanya berlangsung secara kultural, tetapi juga menjadi bagian dari sistem politik yang diwariskan dalam struktur sosial dan pemerintahan lokal.⁶

Dari perspektif politik, Kesultanan Banten memanfaatkan Islam sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk memperkuat pengaruhnya di Lampung. Islam tidak hanya dijadikan sebagai sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, tetapi juga sebagai dasar hukum dan norma sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dengan menjadikan Islam sebagai bagian dari kebijakan politiknya, Kesultanan Banten berhasil membangun jaringan kekuasaan yang berbasis pada kesetiaan keagamaan, sehingga memperkuat posisinya dalam mengendalikan wilayah Lampung. Di sisi lain, adaptasi masyarakat Lampung terhadap Islam juga menunjukkan adanya dinamika politik di mana elite lokal harus menyesuaikan diri dengan pengaruh Kesultanan Banten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana politik kesultanan Banten berperan dalam proses Islamisasi di Lampung? Pertanyaan ini menjadi penting karena Islamisasi di Lampung tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga melibatkan faktor politik yang menentukan arah perkembangan keislaman di wilayah ini. Dengan menelusuri peran politik Kesultanan Banten, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara agama dan kekuasaan dalam sejarah Islamisasi Lampung.

Beberapa peneliti sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang penyebaran islam yang tidak hanya di Lampung saja salah satunya, Penelitian lain yang juga terkait adalah *Proses Islamisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia* oleh Ahmad Sugiri. Penelitian ini membahas bagaimana proses Islamisasi di Indonesia berlangsung dalam interaksi dengan nilai-nilai budaya lokal yang kompleks. Sugiri menunjukkan bahwa Islamisasi di Indonesia, khususnya di Jawa, sering kali berkompromi dengan tradisi pra-Islam seperti Hindu-Buddha dan animisme, sehingga menghasilkan bentuk keberagamaan yang sinkretis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan catatan sejarah. Hasil penelitian

⁶ Herni Indriani, "Strategi Sultan Ageng Tirtayasa dalam Mempertahankan Kesultanan Banten," 31 Oktober 2020, <https://doi.org/10.31219/osf.io/gndc6>.

menunjukkan bahwa Islam di Indonesia, terutama dalam sejarahnya, sering kali lebih berperan dalam aspek politik ketimbang religius. Islam dijadikan sebagai alat legitimasi politik oleh para penguasa, baik dalam konteks kerajaan maupun pemerintahan modern. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana Islamisasi yang berlangsung dalam konteks politik sering kali menghasilkan ketegangan antara Islam dan adat, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini.⁷

Selanjutnya Penelitian lain yang juga terkait adalah *Hubungan Lampung dan Banten dalam Perdagangan Lada dan Islamisasi pada Abad XVII-XVIII*. Penelitian ini membahas keterkaitan antara perdagangan lada dan proses Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Banten terhadap Lampung. Lampung dikenal sebagai daerah penghasil lada terbesar di Sumatera sejak abad XVI, sementara Kesultanan Banten berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Banten dan Lampung dalam perdagangan lada membentuk pola hubungan patron-klien, di mana Banten berperan sebagai patron yang mengendalikan perdagangan lada, sementara Lampung menjadi klien yang bergantung pada Banten. Islamisasi yang dilakukan oleh Banten terhadap Lampung berlangsung secara paralel dengan perdagangan lada melalui jalur perdagangan, perkawinan, politik, dan dakwah. Studi ini mengungkap bahwa Islamisasi di Lampung tidak hanya sebagai akibat dari interaksi dagang, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperkuat kendali Banten atas wilayah tersebut.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah di jelaskan masih ada ruang kosong dalam penelitian selanjutnya yaitu bagaimana politik Islam Kesultanan Banten memengaruhi proses Islamisasi di Lampung serta dampaknya terhadap struktur sosial dan keagamaan masyarakat Lampung.

⁷ Ahmad Sugiri, "Proses Islamisasi Dan Percaturan Politik Umat Islam Di Indonesia," dalam *Al Qalam*, vol. 11, 1996, 43–51, <https://scholar.archive.org/work/hgkng3hvofd5bmucug7tbo14lu/access/wayback/http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/630/513>.

⁸ Harits Fauzan Elda, "Pola Hubungan Lampung dengan Banten dalam Perdagangan Lada dan Islamisasi Aabad XVII-XVIII" (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/30396/>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal akademik, artikel sejarah, maupun dokumen arsip yang berkaitan dengan Islamisasi di Lampung dan peran politik Kesultanan Banten. Pendekatan ini dipilih karena kajian sejarah memerlukan analisis terhadap data sekunder yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks sosial, politik, dan keagamaan di masa lalu.⁹

Terdapat tiga tahapan utama dalam metode penelitian ini. Pertama, pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti karya sejarah mengenai Kesultanan Banten, Islamisasi di Nusantara, serta hubungan antara Banten dan Lampung. Sumber-sumber ini akan diambil dari buku akademik, jurnal penelitian, serta dokumen sejarah yang tersedia di perpustakaan dan repositori digital. Kedua, analisis isi (content analysis) dilakukan untuk menelaah bagaimana politik Kesultanan Banten berperan dalam proses Islamisasi di Lampung, dengan melihat pola interaksi politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang pada masa tersebut. Ketiga, interpretasi data dilakukan untuk menghubungkan temuan dari berbagai sumber guna mendapatkan kesimpulan yang komprehensif mengenai peran politik dalam penyebaran Islam di Lampung. Dengan metode kepustakaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan mendalam mengenai hubungan antara Islamisasi di Lampung dan kebijakan politik Kesultanan Banten, serta bagaimana proses ini membentuk struktur sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ISLAMISASI LAMPUNG DALAM KONTEKS POLITIK KESULTANAN BANTEN

Proses Islamisasi di Lampung tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di Kesultanan Banten pada abad ke-16 hingga ke-18. Sebagai salah satu kekuatan Islam terkemuka di Nusantara, Kesultanan Banten memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang kuat di wilayah Lampung. Hubungan ini didasarkan pada kerja sama

⁹ Amir Hamzah, *Metode penelitian kepustakaan (library research) : kajian filosofis, teoretis, aplikasi, proses, dan hasil penelitian* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020).

perdagangan lada, di mana Lampung menjadi pemasok utama komoditas tersebut bagi Banten.¹⁰ Namun, lebih dari sekadar hubungan ekonomi, Kesultanan Banten juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Lampung melalui intervensi politik, diplomasi dengan elite lokal, serta pengiriman ulama dan pejabat administratif.

Sebagai bagian dari strategi ekspansi politiknya, Kesultanan Banten menjalin hubungan erat dengan penguasa adat di Lampung, termasuk para pemimpin marga dan keratuan yang memiliki otoritas atas masyarakat setempat. Melalui hubungan ini, nilai-nilai Islam mulai diperkenalkan dan diadopsi dalam sistem sosial dan pemerintahan lokal. Kesultanan Banten juga mengirimkan para ulama untuk berdakwah dan membimbing masyarakat Lampung dalam memahami ajaran Islam. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Banten turut memperkuat posisi Islam di Lampung, di mana perdagangan lada yang menjadi sumber ekonomi utama diatur oleh struktur pemerintahan yang berbasis Islam.¹¹ Dengan demikian, politik Kesultanan Banten tidak hanya memperkuat kekuasaannya di Lampung tetapi juga mendorong proses Islamisasi yang berlangsung secara struktural dan berkelanjutan.

Pengaruh Islam di Lampung dalam konteks politik Kesultanan Banten juga terlihat dalam implementasi sistem hukum Islam di wilayah tersebut. Sebagai kesultanan yang berlandaskan ajaran Islam, Banten menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam hubungan dengan daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya, seperti Lampung. Dalam beberapa catatan sejarah, diketahui bahwa Kesultanan Banten mengirimkan pejabat keagamaan serta *qadhi* (hakim Islam) untuk mengawasi penerapan hukum Islam di Lampung.¹² Dengan demikian, Islam tidak hanya berkembang sebagai ajaran keagamaan tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum dan tata kelola masyarakat. Struktur pemerintahan lokal yang sebelumnya berbasis pada hukum adat secara bertahap mengalami

¹⁰ Dinda Sintya dan Isrina Siregar, "Pengaruh Islamisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Banten," *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 2, no. 1 (18 April 2023): 138–45, <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i1.24297>.

¹¹ Karsiwan, *Kejayaan Lada Hingga Praktek Perubahan di Lampung Aabad ke E XVI-XX* (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

¹² Ika Rifqiawati dkk., "Riwayat Bangunan Bersejarah Sebagai Peninggalan Masa Kesultanan Banten," *AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajaranya* 13, no. 2 (29 Juli 2023): 145–62, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v13i2.14491>.

akulturasi dengan nilai-nilai Islam, yang kemudian membentuk identitas keislaman masyarakat Lampung hingga saat ini.

Selain dari aspek hukum dan pemerintahan, Islamisasi di Lampung yang didorong oleh politik Kesultanan Banten juga diperkuat melalui jaringan pendidikan Islam. Ulama yang dikirim oleh Banten tidak hanya berperan sebagai pendakwah tetapi juga sebagai pendidik yang mengajarkan ajaran Islam di surau-surau dan pesantren. Pendidikan agama menjadi salah satu instrumen utama dalam menyebarluaskan ajaran Islam di tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang berkembang di Lampung memiliki keterkaitan erat dengan jaringan keulamaan Banten, yang pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh agama lokal yang berperan dalam memperkuat Islamisasi di Lampung.¹³ Dengan adanya kombinasi strategi politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan ini, Kesultanan Banten berhasil menanamkan pengaruh Islam yang kuat di Lampung, menjadikannya sebagai bagian dari wilayah yang memiliki identitas keislaman yang khas hingga saat ini.

B. HUBUNGAN POLITIK KESULTANAN BANTEN DAN LAMPUNG

Hubungan politik antara Kesultanan Banten dan Lampung memiliki akar yang kuat sejak abad ke-16, terutama karena kepentingan ekonomi dan ekspansi politik yang dilakukan oleh Banten. Kesultanan Banten melihat Lampung sebagai wilayah strategis, baik dari segi sumber daya alam maupun posisinya dalam jalur perdagangan. Salah satu faktor utama yang mempererat hubungan ini adalah perdagangan lada, di mana Lampung menjadi pemasok utama bagi Banten yang saat itu menjadikan lada sebagai komoditas unggulan. Sebagai imbalan, Banten memberikan perlindungan politik kepada para pemimpin lokal di Lampung serta memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dengan pengaruh Islam yang kental. Hubungan ini semakin diperkuat dengan adanya perjanjian dan aliansi antara penguasa lokal di

¹³ Mufliha Wijayati, "Jejak Kesultanan Banten di Lampung Abad XVII (Analisis Prasasti Dalung Bojong)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (6 April 2017): 383–420, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.622>.

Lampung dengan Kesultanan Banten, yang menjadikan Lampung sebagai bagian dari wilayah pengaruh Banten.¹⁴

Selain faktor ekonomi, Kesultanan Banten juga menggunakan strategi politik untuk memastikan loyalitas Lampung. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengangkat pejabat dari kalangan elite lokal yang memiliki kesetiaan terhadap Banten, sekaligus memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan di Lampung tetap sejalan dengan kepentingan kesultanan. Selain itu, Banten mengirimkan ulama dan qadhi untuk membantu mengatur pemerintahan dan memperkuat pengaruh Islam di wilayah ini. Hubungan politik ini juga terlihat dalam bagaimana Banten mendukung para penguasa lokal di Lampung dalam menghadapi ancaman dari pihak luar, seperti kolonial Belanda dan kekuatan-kekuatan lain yang berusaha menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Dengan demikian, hubungan politik antara Kesultanan Banten dan Lampung bukan sekadar hubungan dagang, tetapi juga sebuah sistem politik yang saling menguntungkan, di mana Banten mendapatkan akses terhadap sumber daya Lampung, sementara Lampung memperoleh perlindungan dan pengaruh Islam yang semakin kuat.¹⁵

Selain melalui perjanjian politik dan pengangkatan pejabat lokal, Kesultanan Banten juga memperkuat hubungan politiknya dengan Lampung melalui strategi perkawinan. Beberapa sumber sejarah menunjukkan bahwa terdapat perkawinan antara bangsawan Banten dan elite lokal Lampung sebagai bagian dari diplomasi politik. Perkawinan ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kesetiaan penguasa Lampung kepada Kesultanan Banten. Dengan adanya ikatan darah ini, Banten dapat lebih mudah mengontrol kebijakan di Lampung dan memastikan bahwa kepentingannya tetap terjaga, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun penyebaran Islam.

Di sisi lain, hubungan politik ini juga mengalami dinamika yang kompleks, terutama ketika pengaruh kolonial Belanda mulai mengancam dominasi Banten di Lampung. Pada abad ke-17 dan ke-18, Belanda mulai berusaha menguasai

¹⁴ Endah Humaidah, *Hubungan Kesultanan Banten Dan Lampung Studi Deskriptif Peninggalan Sejarah Dan Budaya Di Cikoneng Anyer* (Depok: Batu Pustaka, 2024), <https://batupustaka.bantenprov.go.id/>.

¹⁵ Fauzan, Hamid, dan Masykuroh, "Perubahan Hubungan Lampung dengan Banten dalam Perdagangan Lada abad XVI-XVIII."

perdagangan lada di Lampung, yang menyebabkan ketegangan antara Kesultanan Banten dan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Dalam beberapa kesempatan, Banten berusaha mempertahankan posisinya di Lampung dengan mengerahkan kekuatan militer dan membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lokal yang menentang kehadiran Belanda. Namun, seiring melemahnya Kesultanan Banten akibat tekanan politik dan ekonomi dari VOC, pengaruhnya di Lampung pun perlahan menurun. Meskipun demikian, jejak politik Banten tetap membekas di Lampung, terutama dalam struktur pemerintahan tradisional dan sistem keislaman yang berkembang di masyarakat hingga saat ini.

Meskipun pengaruh politik Kesultanan Banten di Lampung mulai melemah seiring ekspansi kolonial Belanda, warisan hubungan antara kedua wilayah ini tetap bertahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung. Struktur sosial dan pemerintahan tradisional di Lampung banyak dipengaruhi oleh sistem yang diperkenalkan oleh Banten, terutama dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan lokal.¹⁶ Selain itu, jaringan ulama yang dibangun sejak masa kekuasaan Banten terus berlanjut, bahkan menjadi fondasi penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Lampung. Banyak pesantren dan lembaga keagamaan di wilayah ini yang memiliki hubungan historis dengan Banten, mencerminkan bagaimana Islamisasi yang dilakukan Kesultanan Banten tetap memberikan dampak jangka panjang.

Selain dalam aspek keagamaan, warisan politik Banten juga tercermin dalam pola hubungan antara pemimpin adat dan ulama di Lampung. Adanya perpaduan antara sistem adat dengan nilai-nilai Islam menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Lampung tidak hanya berjalan melalui jalur dakwah, tetapi juga melalui kebijakan politik yang diterapkan oleh Kesultanan Banten. Hubungan ini membuktikan bahwa Islamisasi di Lampung merupakan bagian dari strategi politik yang lebih luas, di mana agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun struktur pemerintahan dan legitimasi kekuasaan.

¹⁶ Ela Yulastini, "Analisis Perkembangan Sejarah Kesultanan Banten pada Masa Pemerintahan Sultan Maulana Yusuf (1570-1580)," *KRINOK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2, no. 2 (2022): 169–79, <https://doi.org/DOI: 10.22437/krinok.v2i2.25514>.

Hubungan politik antara Kesultanan Banten dan Lampung merupakan faktor utama dalam proses Islamisasi di wilayah ini. Banten tidak hanya memperluas pengaruhnya melalui perdagangan lada, tetapi juga melalui strategi politik seperti pengangkatan pejabat lokal, pengiriman ulama, serta perjanjian dan aliansi dengan elite Lampung. Strategi ini memastikan bahwa Islam berkembang secara terstruktur, tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam sistem sosial dan politik masyarakat Lampung.

Meskipun pengaruh Kesultanan Banten akhirnya melemah akibat intervensi kolonial Belanda, dampaknya terhadap Islamisasi Lampung tetap bertahan. Sistem sosial, pemerintahan, dan pendidikan Islam di Lampung masih menunjukkan jejak kuat dari kebijakan politik yang diterapkan oleh Banten. Dengan demikian, peran politik Kesultanan Banten dalam Islamisasi Lampung bukan hanya sekadar perluasan agama, tetapi juga membentuk fondasi penting dalam identitas sosial dan keagamaan masyarakat Lampung hingga saat ini.

C. PERAN KESULTANAN BANTEN DALAM MEMPERKUAT AJARAN ISLAM DI LAMPUNG

Para ulama yang dikirim oleh Banten tidak hanya berperan sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai penasihat politik bagi pemimpin-pemimpin lokal. Mereka bertugas menyebarkan ajaran Islam, membimbing masyarakat dalam memahami syariat, serta membangun jaringan keulamaan yang berkelanjutan. Kehadiran ulama dari Banten membantu mempercepat proses Islamisasi di Lampung dengan mengajarkan nilai-nilai Islam melalui berbagai pendekatan, seperti pengajian di surau-surau, pembentukan pesantren, serta keterlibatan dalam sistem pemerintahan lokal.

Kesultanan Banten juga berkontribusi dalam pembangunan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di Lampung. Masjid-masjid yang didirikan berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam dan penyebaran ajaran tauhid di kalangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah masjid-masjid tua di wilayah pesisir Lampung yang diduga memiliki keterkaitan historis dengan ekspansi Islam oleh Banten. Pembangunan masjid ini memperkuat Islamisasi karena menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk mendalami ilmu agama, berkonsultasi dengan ulama, serta membangun solidaritas

keislaman. Dengan adanya pusat keagamaan yang mapan, Islam semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun hukum.¹⁷

Keberhasilan Banten juga menyoroti pentingnya pendidikan Islam melalui integrasinya ke dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Lampung. Pendidikan Agama Islam melalui integrasinya ke dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Lampung. Salah satu strategi utama adalah dengan memperkenalkan sistem hukum Islam yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk hukum pernikahan, warisan, dan perdagangan. Hukum Islam secara perlahan menggantikan atau mengakomodasi hukum adat setempat, menciptakan sistem sosial yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, Kesultanan Banten juga menjalin hubungan dengan para pemimpin adat dan bangsawan Lampung, yang kemudian menjadi penyebar Islam di komunitasnya masing-masing. Dengan cara ini, ajaran Islam semakin kuat dan tidak hanya terbatas pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga membentuk sistem nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat Lampung hingga saat ini.¹⁸

Dalam memperkuat ajaran Islam di Lampung, Kesultanan Banten juga menerapkan strategi pembinaan komunitas Muslim yang berorientasi pada pendidikan dan ekonomi. Selain membangun masjid dan mengirim ulama, Banten turut mendukung pendirian pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam mencetak generasi ulama dan pemimpin Muslim di Lampung. Pesantren-pesantren ini menjadi pusat pembelajaran yang mengajarkan ilmu agama seperti tafsir, fiqh, dan tasawuf, serta memperkenalkan aksara Arab-Melayu sebagai media literasi Islam di wilayah tersebut. Melalui pendidikan pesantren, Islamisasi di Lampung berjalan lebih sistematis, memastikan bahwa generasi penerus memahami ajaran Islam dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Beberapa pesantren

¹⁷ Ali Hasmy, *Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia: kumpulan prasaran pada seminar di Aceh* (Jakarta: Alma'arif, 1981).

¹⁸ Chitra Imelda dkk., "Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia," dalam *Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

¹⁹ Muslimah Muslimah, "Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode Pra Kemerdekaan," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 1 (20 Juni 2017): 136, <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.576>.

yang berkembang di Lampung memiliki koneksi dengan ulama dan sistem pendidikan Islam di Banten, menunjukkan kesinambungan hubungan antara kedua wilayah dalam upaya memperkuat Islamisasi.

Selain aspek pendidikan, sektor ekonomi meenjadi misi terutama dalam perdagangan lada. Sebagai pemasok utama lada bagi Banten, masyarakat Lampung banyak berinteraksi dengan pedagang Muslim dari Banten dan daerah lain, yang secara tidak langsung turut menyebarkan nilai-nilai Islam. Sistem perdagangan yang diterapkan Banten berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan penerapan akad jual beli yang sesuai dengan syariat. Hal ini menjadikan Islam tidak hanya sekadar agama yang dianut, tetapi juga menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan keterlibatan dalam perdagangan yang berbasis Islam serta interaksi dengan komunitas Muslim dari berbagai daerah, Islamisasi di Lampung semakin menguat dan menjadi bagian dari struktur sosial-ekonomi masyarakatnya.

Peran Kesultanan Banten dalam mengirim ulama, membangun masjid, serta memperkuat ajaran Islam melalui pendidikan dan ekonomi menunjukkan bahwa Islamisasi di Lampung bukanlah proses yang berlangsung secara spontan, melainkan merupakan bagian dari kebijakan politik dan sosial yang dirancang secara sistematis. Dampak dari strategi ini masih dapat dirasakan hingga saat ini, di mana Islam menjadi identitas utama masyarakat Lampung, baik dalam aspek keagamaan, budaya, maupun sosial. Kesultanan Banten tidak hanya memperkenalkan Islam sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk pola kehidupan masyarakat Lampung, menjadikannya salah satu wilayah dengan tradisi Islam yang kuat di Nusantara.

D. STRUKTUR SOSIAL DAN KEAGAMAAN AKIBAT ISLAMISASI DI LAMPUNG

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Lampung menjalankan sistem sosial yang berakar pada adat dan kepercayaan animisme serta dinamisme. Namun, dengan masuknya Islam, struktur sosial mulai mengalami transformasi, terutama dalam aspek kepemimpinan dan sistem nilai yang dianut masyarakat. Pemuka adat yang sebelumnya menjadi figur utama dalam masyarakat mulai berbagi peran dengan ulama dan tokoh agama. Integrasi ulama dalam kepemimpinan lokal menghasilkan sistem

dualisme otoritas, di mana pemimpin adat tetap berperan dalam urusan sosial dan budaya, sementara ulama memiliki otoritas dalam bidang keagamaan dan moralitas masyarakat. Selain perubahan dalam kepemimpinan, Islamisasi juga membawa pergeseran dalam struktur keluarga dan sistem hukum yang berlaku di Lampung. Sebelum Islamisasi, hukum adat menjadi satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Namun, setelah Islam semakin mengakar, hukum Islam mulai diadopsi dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep pernikahan dalam Islam, seperti akad nikah dan mahar, mulai menggantikan tradisi pernikahan adat yang sebelumnya lebih fleksibel dan bergantung pada kesepakatan keluarga besar. Begitu pula dalam sistem warisan, hukum Islam yang mengatur pembagian harta berdasarkan Al-Qur'an dan hadis mulai diterapkan, menggantikan sistem warisan adat yang sebelumnya lebih bersifat kolektif dalam keluarga besar.²⁰

Dalam aspek keagamaan, Islamisasi menyebabkan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memperkuat identitas keislaman masyarakat Lampung. Pesantren-pesantren yang didirikan oleh ulama Banten dan Lampung menjadi pusat pendidikan agama, tempat generasi muda mempelajari Al-Qur'an, fiqh, tasawuf, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Keberadaan pesantren ini mempercepat proses Islamisasi, tidak hanya dalam praktik ibadah tetapi juga dalam pembentukan karakter dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial. Selain itu, masjid sebagai pusat keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat musyawarah, pengadilan berbasis hukum Islam, serta pusat dakwah yang memperkokoh ajaran Islam dalam masyarakat Lampung.²¹

Islamisasi juga mempengaruhi budaya dan tradisi masyarakat Lampung, yang kemudian mengalami asimilasi dengan nilai-nilai Islam. Tradisi adat seperti Pepadun, yang merupakan sistem kepemimpinan tradisional, mulai mengalami modifikasi dengan memasukkan unsur-unsur Islam dalam praktiknya. Nilai-nilai Islam juga tercermin dalam seni, sastra, dan bahasa, di mana penggunaan aksara Arab-Melayu

²⁰ Ahmad Zarkasi, *Islam dan Budaya Lampung* (Yogyakarta: Idea Press, 2020).

²¹ Tri Wahyuni, Inni Inayati Istiana, dan Ratna Asmarani, "Denda Adat pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 1 (30 Juni 2023): 77–90, <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1895>.

mulai menggantikan aksara tradisional dalam berbagai manuskrip dan dokumen. Ritual-ritual adat yang sebelumnya berorientasi pada kepercayaan animisme juga mulai diubah agar lebih selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Islamisasi tidak hanya memengaruhi struktur sosial dan hukum, tetapi juga membentuk identitas budaya masyarakat Lampung yang hingga kini tetap memadukan antara adat dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.²²

E. PENGARUH POLITIK ISLAM DALAM SISTEM ADAT DAN SOSIAL LAMPUNG

Masuknya Islam ke Lampung juga memberikan dampak membawa perubahan mendasar dalam sistem adat dan sosial masyarakat setempat. Sebelum Islamisasi, masyarakat Lampung menerapkan sistem sosial berbasis adat yang kuat, dengan kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun dalam kelompok-kelompok marga. Sistem ini dikenal dengan Pepadun, yang menentukan status sosial seseorang berdasarkan garis keturunan dan kepemilikan adat. Namun, setelah Islam mulai tersebar luas, sistem ini mengalami modifikasi dengan memasukkan unsur-unsur Islam, terutama dalam aspek kepemimpinan dan norma sosial. Pemimpin adat mulai mengadopsi nilai-nilai Islam dalam tata pemerintahan, seperti konsep keadilan dan musyawarah (syura), serta menjadikan ulama sebagai penasihat dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan masyarakat.²³

Selain itu, pengaruh politik Islam juga terlihat dalam sistem hukum yang berlaku di Lampung. Sebelum kedatangan Islam, hukum adat menjadi satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam bidang perkawinan, warisan, maupun penyelesaian konflik. Namun, setelah Islamisasi yang dipengaruhi oleh Kesultanan Banten, hukum Islam mulai diterapkan secara bertahap. Konsep hukum waris Islam, misalnya, mulai menggantikan sistem warisan adat yang lebih kolektif, sehingga pembagian harta warisan mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an. Begitu pula

²² Firnando Firnando, Cahiril Anwar, dan Imam Syafe'i, "Khazanah Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Nilai Dalam Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin," *Hikmah* 20, no. 1 (20 Juni 2023): 13–30, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.198>.

²³ A. Fauzie Nurdin, "Integralisme Islam Dan Kontribusi Budaya Muakhi Bagi Peradaban Masyarakat Serta Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Budaya Lokal Dan Pembangunan Masyarakat Lampung," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (30 Juni 2019): 35–50, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4481>.

dalam hukum pernikahan, akad nikah dan mahar menjadi unsur yang wajib dalam setiap pernikahan, menyesuaikan dengan ajaran Islam. Keberadaan Qadhi atau hakim Islam yang ditunjuk oleh ulama juga memperkuat peran Islam dalam sistem hukum, memberikan masyarakat Lampung alternatif penyelesaian konflik yang berbasis pada syariat.²⁴

Sebelum proses Islamisasi, status sosial seseorang di Lampung sangat bergantung pada keturunan dan posisinya dalam struktur adat. Namun, setelah Islam semakin diterima oleh masyarakat, status sosial mulai lebih terbuka bagi mereka yang memiliki keilmuan agama dan kontribusi terhadap komunitas Muslim. Para ulama, misalnya, memperoleh kedudukan terhormat di masyarakat, sejajar dengan para pemimpin adat. Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi membawa konsep meritokrasi dalam struktur sosial, di mana seseorang dapat memperoleh posisi terhormat tidak hanya karena garis keturunan, tetapi juga karena ilmunya dan dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Islam.

Politik Islam juga memengaruhi sistem pemerintahan tradisional di Lampung. Salah satu bukti nyata dari pengaruh ini adalah bagaimana pemimpin adat mulai menerapkan prinsip Musyawarah Mufakat, yang dalam Islam dikenal dengan konsep syura. Keputusan yang sebelumnya didominasi oleh kepala adat kini semakin melibatkan ulama dan tokoh masyarakat, yang memberikan perspektif keislaman dalam kebijakan sosial. Selain itu, tradisi pembayaran zakat dan sedekah yang diperkenalkan melalui Islam menjadi bagian dari sistem sosial yang mengikat komunitas dalam semangat kebersamaan dan gotong royong. Institusi keagamaan seperti masjid dan pesantren juga semakin berkembang sebagai pusat pendidikan dan pengambilan keputusan, menandakan semakin kuatnya peran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung.²⁵

Dengan demikian, pengaruh politik Islam dalam sistem adat dan sosial Lampung tidak hanya sebatas aspek keagamaan, tetapi juga mencakup perubahan

²⁴ Siti Badi'ah, Idrus Ruslan, dan Siti Huzaimah, "Islam and Local Culture: The Practice of Hippun Tradition Among the Lampungnese Muslims," *KALAM* 15, no. 1 (30 Juni 2021): 87–102, <https://doi.org/10.24042/klm.v15i1.8464>.

²⁵ Zainal Abidin, Basri Basri, dan Rahma Dwi Nopriyana, "The Network of Ulama in Lampung Tracing the Islamic Developmen and Its Influence on Local Tradition and Culture," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 2 (25 November 2020): 315–32, <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i2.1672>.

dalam hukum, kepemimpinan, serta struktur sosial masyarakat. Islam tidak menggantikan adat sepenuhnya, tetapi justru menyatu dalam sistem adat, menciptakan kombinasi unik antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Transformasi ini menunjukkan bahwa politik Islam, terutama melalui pengaruh Kesultanan Banten, memainkan peran krusial dalam membentuk karakter masyarakat Lampung yang hingga kini tetap mempertahankan warisan adat dengan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial mereka.

F. TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN ADAT DAN PERAN ULAMA

Struktur kepemimpinan adat juga terpengaruh yang di bawa oleh Kesultanan Banten. Sebelum Islam masuk, sistem kepemimpinan di Lampung didasarkan pada adat dan garis keturunan yang dikenal dengan sistem Pepadun, di mana pemimpin adat atau Saibatin memiliki otoritas penuh dalam mengatur masyarakat. Status sosial seseorang ditentukan oleh asal-usul keluarga dan kepemilikan gelar adat. Namun, dengan masuknya Islam, sistem ini mengalami modifikasi yang mengarah pada integrasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Pemimpin adat mulai mengadopsi ajaran Islam dalam sistem pemerintahan, seperti penerapan prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.²⁶

Salah satu perubahan utama dalam kepemimpinan adat setelah Islamisasi adalah meningkatnya peran ulama dalam struktur sosial masyarakat. Sebelumnya, pemimpin adat memiliki kewenangan tunggal dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan komunitas. Namun, setelah Islam semakin berkembang, ulama mulai diberikan peran sebagai penasihat utama bagi pemimpin adat dalam urusan sosial dan keagamaan. Ulama tidak hanya bertindak sebagai pengajar agama, tetapi juga berperan dalam memberi fatwa, mengawasi pelaksanaan hukum Islam, serta menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Kehadiran ulama dalam sistem kepemimpinan ini menciptakan keseimbangan antara adat dan Islam, di mana kebijakan sosial harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam selain norma adat yang telah lama berlaku.

²⁶ I. Yahya dan Sahidin Sahidin, "Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 2022, <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405>.

Transformasi kepemimpinan adat juga terlihat dalam cara pemilihan dan legitimasi seorang pemimpin. Sebelum Islamisasi, kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan bangsawan atau elite adat. Namun, setelah Islam berakar kuat, pemimpin tidak hanya dinilai berdasarkan keturunan, tetapi juga harus memiliki pemahaman agama yang baik dan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep kepemimpinan berlandaskan keilmuan dan ketakwaan mulai diterapkan, di mana seorang pemimpin adat tidak hanya dihormati karena statusnya, tetapi juga karena kemampuannya dalam mengayomi masyarakat dengan prinsip Islam. Hal ini membuat banyak ulama yang kemudian mendapatkan posisi strategis dalam kepemimpinan adat, baik sebagai penasihat maupun sebagai pemimpin spiritual yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, ulama juga memainkan peran dalam penyebaran Islam melalui sistem pendidikan dan keagamaan. Salah satu bentuk nyata dari peran ini adalah pendirian pesantren-pesantren yang menjadi pusat pembelajaran Islam di Lampung. Melalui pesantren, ulama tidak hanya mencetak generasi Muslim yang taat, tetapi juga kader-kader pemimpin yang nantinya berperan dalam masyarakat. Pendidikan Islam yang diajarkan di pesantren meliputi tafsir Al-Qur'an, hadis, fiqih, serta tasawuf, yang membentuk karakter kepemimpinan Islam yang berorientasi pada keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pesantren berkontribusi dalam mencetak pemimpin adat yang memiliki pemahaman Islam yang kuat, sehingga mampu menjalankan peran kepemimpinan yang lebih inklusif dan berbasis syariat.

Selain itu, ulama juga memiliki peran dalam memperkuat hukum Islam dalam masyarakat. Sebelum Islamisasi, penyelesaian sengketa dalam masyarakat Lampung sepenuhnya menggunakan hukum adat, yang lebih fleksibel dan berorientasi pada mufakat. Namun, setelah Islam berkembang, hukum Islam mulai diterapkan dalam beberapa aspek, seperti hukum waris, pernikahan, dan perdagangan. Ulama menjadi tokoh utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin adat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan ulama dalam struktur

kepemimpinan ini memperkuat sinergi antara adat dan Islam, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang dan diterima oleh masyarakat luas.²⁷

Dengan demikian, transformasi kepemimpinan adat di Lampung tidak hanya mencerminkan pergeseran otoritas dari pemimpin adat ke ulama, tetapi juga menunjukkan integrasi Islam dalam struktur sosial dan politik masyarakat Lampung. Peran ulama yang semakin kuat dalam kepemimpinan membentuk sistem yang lebih berbasis pada nilai-nilai Islam, tanpa menghilangkan identitas adat yang telah lama berkembang. Integrasi ini menghasilkan kepemimpinan yang lebih adaptif, di mana adat dan Islam saling menguatkan dalam membentuk tatanan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan. Hingga kini, perpaduan antara sistem kepemimpinan adat dan peran ulama tetap menjadi ciri khas masyarakat Lampung, menjadikannya salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tradisi Islam yang kuat dalam sistem sosial dan pemerintahannya.

G. DINAMIKA ISLAMISASI: PERLAWANAN DAN ADAPTASI

Proses Islamisasi di Lampung tidak selalu berjalan mulus, tetapi mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan interaksi antara kekuatan politik, budaya, dan kepentingan lokal. Kesultanan Banten sebagai penguasa yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Lampung menghadapi berbagai tantangan, baik dari kelompok-kelompok adat yang masih mempertahankan tradisi pra-Islam maupun dari kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Pada tahap awal, Islamisasi di Lampung lebih bersifat gradual, dengan pendekatan kultural yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam adat yang telah mengakar. Namun, ada pula resistensi dari kelompok-kelompok yang melihat Islam sebagai ancaman terhadap sistem sosial dan kepercayaan mereka yang telah lama berlangsung.²⁸

Perlawanan terhadap Islamisasi di Lampung sebagian besar berasal dari kelompok adat yang masih memegang teguh kepercayaan animisme dan dinamisme.

²⁷ Vinken Geovannissa Wijaya, "Conceptions of Islam in Indonesian Public Life: a Study of The Nahdlatul Ulama's Journal Tashwirul Afkar (1997-2016)," *Tashwirul Afkar* 41, no. 2 (30 Desember 2022): 111–36, <https://doi.org/10.51716/ta.v41i2.72>.

²⁸ R. Ellefsen dan Sveinung Sandberg, "A repertoire of everyday resistance: young Muslims' responses to anti-Muslim hostility," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 48 (2021): 2601–19, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1894913>.

Bagi mereka, Islam membawa perubahan yang mengancam struktur sosial tradisional yang telah mapan. Salah satu bentuk perlawanan yang terjadi adalah penolakan terhadap hukum Islam dalam sistem warisan dan pernikahan, di mana kelompok adat lebih memilih mempertahankan sistem yang diwariskan oleh leluhur mereka.²⁹ Selain itu, beberapa pemimpin adat juga menolak peran ulama dalam struktur kepemimpinan mereka, karena dianggap dapat mengurangi otoritas pemimpin adat yang selama ini memiliki kendali penuh atas masyarakat.

Islamisasi di Lampung berkembang melalui strategi adaptasi yang diterapkan oleh ulama dan Kesultanan Banten. Salah satu pendekatan utama adalah sinkretisme, yaitu penggabungan unsur Islam dengan adat lokal agar lebih mudah diterima masyarakat. Tradisi seperti Pepadun mulai memasukkan ajaran Islam dalam sistem kepemimpinan adat. Selain itu, perdagangan juga menjadi jalur penting dalam penyebaran Islam, di mana pedagang Muslim yang datang ke Lampung tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam melalui praktik kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, Islamisasi terjadi secara alami tanpa paksaan.

Selain melalui jalur budaya dan ekonomi, Islamisasi diperkuat oleh peran pesantren dan masjid sebagai pusat pendidikan dan dakwah. Ulama dari Banten berperan dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan adat lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Seiring waktu, perlawanan terhadap Islamisasi mereda ketika masyarakat mulai melihat Islam sebagai bagian dari identitas mereka. Kesultanan Banten juga mendukung pemimpin adat yang menerima Islam, sehingga proses Islamisasi semakin kuat. Akhirnya, Islam dan adat berbaur, membentuk karakter masyarakat Lampung yang tetap mempertahankan tradisi mereka, tetapi menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

H. PENERAPAN AJARAN ISLAM DI MASYARAKAT ADAT

Proses Islamisasi di Lampung, seperti di banyak wilayah lain di Nusantara, tidak berjalan tanpa hambatan. Meskipun ajaran Islam diperkenalkan secara bertahap melalui dakwah, perdagangan, dan interaksi sosial, terdapat resistensi dari kelompok

²⁹ Yusuf Baihaqi dkk., "The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 310, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12493>.

adat yang merasa bahwa ajaran Islam dapat mengubah tatanan sosial yang telah mereka anut selama berabad-abad. Konflik yang muncul dalam penerapan ajaran Islam ini sering kali terkait dengan sistem kepemimpinan, adat istiadat, serta hukum yang sebelumnya telah tertanam kuat dalam masyarakat Lampung.

Salah satu bentuk resistensi utama adalah penolakan terhadap hukum Islam dalam sistem adat. Sebelum Islamisasi, hukum adat Lampung didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh pemimpin adat. Ketika Islam mulai masuk dan membawa sistem hukum baru, seperti hukum waris Islam yang mengatur pembagian harta secara lebih proporsional antara laki-laki dan perempuan, banyak kelompok adat yang menolak perubahan ini karena dianggap bertentangan dengan kebiasaan mereka. Dalam sistem adat Lampung, misalnya, pewarisan lebih mengutamakan keturunan laki-laki dari garis tertentu, sementara Islam membawa prinsip yang lebih merata tetapi tetap memberikan keunggulan kepada laki-laki dalam pembagian warisan.³⁰

Selain itu, konsep kepemimpinan juga menjadi sumber konflik. Dalam struktur adat Lampung, pemimpin atau Saibatin memiliki otoritas penuh atas pengambilan keputusan, dan sistem hierarki adat yang dikenal sebagai Pepadun mengatur kedudukan sosial berdasarkan keturunan. Namun, dengan masuknya Islam, konsep kepemimpinan yang berbasis keturunan mulai mengalami tantangan dari sistem Islam yang lebih menekankan pada kapasitas keilmuan dan ketakwaan seseorang. Ulama yang datang dari Kesultanan Banten sering kali mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin spiritual, sehingga peran mereka mulai menggeser dominasi pemimpin adat dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan politik.

Resistensi juga muncul dalam bentuk perlawanan budaya. Beberapa tradisi yang sebelumnya merupakan bagian dari ritual adat dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti upacara persembahan kepada roh nenek moyang dan penggunaan jimat dalam kehidupan sehari-hari. Islam yang mengajarkan tauhid dan pelarangan terhadap praktik-praktik yang dianggap syirik menghadapi tantangan dari kelompok adat yang menganggap ritual tersebut sebagai bagian integral dari identitas mereka.

³⁰ I. Idham dkk., "The Marriage Practices Of Indigenous Peoples Of Lampung Sebatin From The Perspective Of Islamic Family Law In Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 1 (12 Agustus 2021): 65, <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9816>.

Dalam beberapa kasus, upaya penghapusan praktik-praktik tersebut menimbulkan ketegangan antara kelompok ulama dan pemuka adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur mereka.

Konflik juga muncul dalam ranah sosial, terutama dalam hal pernikahan. Sebelum Islam berkembang luas, pernikahan dalam masyarakat Lampung sering kali diatur berdasarkan sistem adat yang ketat, termasuk praktik-praktik seperti belis (mas kawin dalam jumlah besar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki). Ketika Islam masuk dan mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan serta menekankan akad sebagai aspek utama dalam pernikahan, beberapa kelompok adat menganggapnya sebagai ancaman terhadap tatanan sosial mereka. Dalam beberapa kasus, pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam tanpa memenuhi ketentuan adat dianggap tidak sah oleh kelompok adat konservatif.³¹

Namun, meskipun terdapat resistensi, Islamisasi di Lampung tetap berlangsung secara bertahap dengan berbagai bentuk kompromi dan adaptasi. Para ulama dan pemimpin Islam di Lampung tidak serta-merta menghapus adat yang telah ada, tetapi berusaha untuk mengislamkan adat agar lebih sesuai dengan syariat. Beberapa ritual adat yang sebelumnya memiliki unsur animisme mulai disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti penggantian persembahan roh dengan doa bersama atau tahlilan. Dalam aspek hukum, hukum adat dan hukum Islam mulai berjalan berdampingan, di mana keputusan adat tetap dihormati tetapi dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan Islam.

Dengan demikian, resistensi dalam penerapan ajaran Islam di masyarakat adat Lampung merupakan bagian dari dinamika Islamisasi yang terjadi secara kompleks. Konflik yang muncul bukan hanya sekadar penolakan terhadap ajaran Islam, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat adat mempertahankan identitas mereka dalam menghadapi perubahan. Namun, melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, Islamisasi akhirnya berhasil menyatu dengan tradisi adat Lampung, menciptakan sebuah identitas Islam yang tetap menghargai kearifan lokal dan membentuk struktur sosial yang khas di wilayah tersebut.

³¹ Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (19 Mei 2023): 12–30, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7776>.

I. ADAPTASI ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL LAMPUNG

Salah satu bentuk adaptasi Islam dengan budaya lokal terlihat dalam sistem Pepadun, yaitu struktur sosial yang membentuk hierarki dalam masyarakat adat Lampung. Meskipun Islam menekankan kesetaraan umat di hadapan Allah, sistem Pepadun tetap dipertahankan dengan beberapa modifikasi. Dalam perkembangannya, nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam Pepadun, seperti dalam prosesi pengangkatan pemimpin adat (Saibatin atau Punyimbang), yang mulai mempertimbangkan aspek keislaman seseorang, seperti pengetahuan agama dan kemampuan membaca Al-Qur'an. Dengan demikian, Islam tidak menggantikan struktur adat, tetapi justru menyelaraskan ajaran agamanya dengan sistem sosial yang telah ada.³²

Di bidang ritual adat, Islam juga mengalami akulturasi dengan tradisi Lampung. Sebelum Islamisasi, masyarakat Lampung memiliki berbagai upacara yang bersifat animistik, seperti sesaji untuk roh nenek moyang. Namun, setelah Islam masuk, tradisi ini mulai disesuaikan dengan ajaran Islam. Misalnya, tradisi Ngumbai (syukuran adat) yang sebelumnya berisi ritual persembahan kepada leluhur, kini diubah menjadi doa bersama dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan shalawat. Demikian pula dengan tradisi Begawi, yaitu acara adat dalam sistem Pepadun, yang kini disertai dengan pengajian dan pembacaan doa-doa Islam.

Dalam hukum adat, Islamisasi juga membawa pengaruh besar terhadap tata cara penyelesaian sengketa dan hukum keluarga. Sebelum Islam masuk, masyarakat Lampung menerapkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, warisan, dan penyelesaian konflik. Namun, dengan masuknya Islam, hukum adat mulai mengalami penyesuaian dengan prinsip syariat. Misalnya, dalam hal perkawinan, sistem Belis (mas kawin dalam jumlah besar) yang semula menjadi keharusan dalam adat Lampung mulai mengalami modifikasi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan. Begitu pula

³² Rahma Zakia Al Erza, Agus Pahrudin, dan Chairul Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (22 Februari 2024): 85–91, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087>.

dalam pembagian warisan, yang mulai menyesuaikan dengan hukum faraid dalam Islam.³³

Di bidang kesenian dan sastra, Islam juga berasimilasi dengan budaya Lampung. Syair dan pantun adat yang sebelumnya berisi nilai-nilai kepercayaan lokal mulai diwarnai dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam hadra dan debuss, seni bela diri dan tarian tradisional Lampung, unsur keislaman mulai masuk, seperti pembacaan dzikir dan shalawat dalam setiap pertunjukan. Pakaian adat Lampung pun mengalami adaptasi dengan pengaruh Islam, di mana pakaian perempuan semakin disesuaikan dengan nilai-nilai kesopanan dalam Islam, seperti penggunaan kerudung dalam acara adat.

Selain dalam aspek budaya dan sosial, adaptasi Islam juga terlihat dalam sistem pendidikan di Lampung. Sebelum Islam masuk, pendidikan lebih banyak diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga dan komunitas adat. Namun, setelah Islamisasi, sistem pendidikan berbasis pesantren mulai berkembang di Lampung. Pesantren-pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengakomodasi kearifan lokal dalam kurikulumnya. Para ulama yang datang dari Banten dan daerah lain di Nusantara memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan Islam yang tetap menghargai adat Lampung.³⁴

Dari berbagai bentuk adaptasi ini, dapat disimpulkan bahwa Islamisasi di Lampung tidak bersifat memaksakan perubahan, melainkan terjadi secara bertahap dengan menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Islam dan adat Lampung akhirnya berkembang dalam suatu simbiosis yang harmonis, di mana Islam memberikan dasar moral dan spiritual, sementara adat tetap menjadi identitas yang memperkuat kebersamaan masyarakat. Proses ini membentuk karakter Islam di Lampung yang unik, yaitu tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, namun tetap menghargai kearifan lokal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat.

³³ Evan Supriyadi, Rahmat, dan Moh Ali Murtadlo, "Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam Budaya Masyarakat Lampung Pepadun," *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (30 Juni 2023): 78–96, <https://doi.org/10.62448/bujie.v1i1.10>.

³⁴ Firnando, Anwar, dan Syafe'i, "Khazanah Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal."

HASIL TEMUAN

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa Kesultanan Banten memainkan peran strategis dalam proses Islamisasi di Lampung, terutama melalui jalur politik dan ekonomi. Kesultanan Banten tidak hanya berperan sebagai pusat penyebaran Islam, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mengintegrasikan Lampung ke dalam sistem pemerintahan Islam. Dengan hubungan politik yang kuat antara Banten dan Lampung, Islam berkembang melalui interaksi antara para pedagang, ulama, dan pemimpin lokal. Selain itu, jalur perdagangan yang menghubungkan Lampung dengan Banten mempercepat penyebaran ajaran Islam, terutama di kalangan elite lokal yang kemudian turut menyebarkan Islam kepada masyarakat luas.

Masuknya Islam juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat Lampung. Sistem kepemimpinan yang semula berbasis pada hierarki adat mulai mengalami modifikasi dengan masuknya nilai-nilai Islam yang lebih egaliter. Meskipun sistem Pepadun dan Saibatin tetap dipertahankan, pengaruh Islam tampak dalam seleksi kepemimpinan yang mulai mempertimbangkan aspek keagamaan. Selain itu, hukum adat juga mengalami penyesuaian dengan hukum Islam, terutama dalam hal pernikahan dan warisan. Islamisasi tidak serta-merta menghilangkan adat yang telah ada, tetapi justru memberikan warna baru yang membentuk tatanan sosial yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Interaksi antara Islam dan budaya lokal Lampung menghasilkan akulturasi yang khas, mencerminkan harmoni antara ajaran Islam dan tradisi adat. Berbagai ritual adat yang sebelumnya mengandung unsur animisme mulai mengalami transformasi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti penggantian sesaji dengan doa dan tahlilan. Dalam kesenian dan sastra, unsur Islam mulai masuk melalui syair-syair bernuansa religius dan seni pertunjukan seperti hadra yang menggabungkan unsur zikir dalam pementasannya. Adaptasi ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Lampung tidak berlangsung secara frontal, tetapi melalui proses asimilasi yang memungkinkan masyarakat tetap mempertahankan identitas budaya mereka dalam bingkai ajaran Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Lampung merupakan hasil dari proses politik, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Kesultanan Banten berperan sebagai agen utama dalam proses ini, sementara



masyarakat Lampung tidak hanya menerima Islam secara pasif, tetapi juga turut membentuk karakter Islam yang khas dengan mempertahankan kearifan lokal mereka. Hal ini mencerminkan bahwa Islamisasi di Lampung tidak sekadar mengubah keyakinan masyarakat, tetapi juga membentuk dinamika sosial dan budaya yang berkelanjutan hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Basri Basri, dan Rahma Dwi Nopriyana. "The Network of Ulama in Lampung Tracing the Islamic Developmen and Its Influence on Local Tradition and Culture." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 2 (25 November 2020): 315–32. <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i2.1672>.
- Aizid, Rizem. *Sejarah Islam Nusantara: Dari Analisis Historis hingga Arkeologis tentang Penyebaran Islam di Nusantara*. Yogyakarta: DIVA PRESS, 2016.
- Badi'ah, Siti, Idrus Ruslan, dan Siti Huzaimah. "Islam and Local Culture: The Practice of Hippun Tradition Among the Lampungnese Muslims." *KALAM* 15, no. 1 (30 Juni 2021): 87–102. <https://doi.org/10.24042/klm.v15i1.8464>.
- Baihaqi, Yusuf, Abdurrohman Kasdi, Umma Farida, dan Helma Maraliza. "The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 310. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.12493>.
- Elda, Harits Fauzan. "Pola Hubungan Lampung dengan Banten dalam Perdagangan Lada dan Iskamisasi Aabad XVII-XVIII." Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/30396/>.
- Ellefsen, R., dan Sveinung Sandberg. "A repertoire of everyday resistance: young Muslims' responses to anti-Muslim hostility." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 48 (2021): 2601–19. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1894913>.
- Evan Supriyadi, Rahmat, dan Moh Ali Murtadlo. "Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam Budaya Masyarakat Lampung Pepadun." *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (30 Juni 2023): 78–96. <https://doi.org/10.62448/bujie.v1i1.10>.

Fauzan, Elda Harits, Abd Rahman Hamid, dan Siti Masykuroh. “Perubahan Hubungan Lampung dengan Banten dalam Perdagangan Lada abad XVI-XVIII.” *JAWI* 6, no. 2 (30 Desember 2023): 85. <https://doi.org/10.24042/00202361942100>.

Firmando, Firmando, Cahirul Anwar, dan Imam Syafe'i. “Khazanah Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Nilai Dalam Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin.” *Hikmah* 20, no. 1 (20 Juni 2023): 13–30. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.198>.

Hamzah;, Amir. *Metode penelitian kepustakaan (library research) : kajian filosofis, teoretis, aplikasi, proses, dan hasil penelitian*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Hasymy, Ali. *Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia: kumpulan prasaran pada seminar di Aceh*. Jakarta: Alma'arif, 1981.

Humaidah, Endah. *Hubungan Kesultanan Banten Dan Lampung Studi Deskriptif Peninggalan Sejarah Dan Budaya Di Cikoneng Anyer*. Depok: Batu Pustaka, 2024. <https://batupusaka.bantenprov.go.id/>.

Idham, I., Liky Faizal, Abdul Qohar, dan H. Hanif. “The Marriage Practices Of Indigenous Peoples Of Lampung Sebatin From The Perspective Of Islamic Family Law In Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 1 (12 Agustus 2021): 65. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9816>.

Imelda, Chitra, Jurgen R. Litualy, Fernando Tantar, Yeheskel Wessy, Hera Susanti, Ferawati Royani, Anna Andriany Siagian, Ummu Aemanah, dan Agustinus Nindatu. “Pengaruh Kebudayaan daalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia.” Dalam *Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

Indriani, Herni. “Strategi Sultan Ageng Tirtayasa dalam Mempertahankan Kesultanan Banten,” 31 Oktober 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gndc6>.

Karsiwan. *Kejayaan Lada Hingga Praktek Perubahan di Lampung Aabad ke E XVI-XX*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Muslimah, Muslimah. “Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode Pra Kemerdekaan.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 1 (20 Juni 2017): 136. <https://doi.org/10.23971/jsam.v13i1.576>.



- Muslimin, Muslimin. “Kontribusi Ulama dalam Pendidikan Islam dari Masa Ke Masa.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 23, no. 1 (28 Februari 2013). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.12>.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Nuridin, A. Fauzie. “Integralisme Islam Dan Kontribusi Budaya Muakhi Bagi Peradaban Masyarakat Serta Relevansi Nilai-Nilai Filosofis Budaya Lokal Dan Pembangunan Masyarakat Lampung.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (30 Juni 2019): 35–50. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4481>.
- Putra, Dedisyah. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu.” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (19 Mei 2023): 12–30. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7776>.
- Rifqiawati, Ika, Enggar Utari, Muhammad Jafar Aulia, dan Tazkia Salsabila. “Riwayat Bangunan Bersejarah Sebagai Peninggalan Masa Kesultanan Banten.” *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 13, no. 2 (29 Juli 2023): 145–62. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v13i2.14491>.
- Sintya, Dinda, dan Isrina Siregar. “Pengaruh Islamisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Banten.” *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 2, no. 1 (18 April 2023): 138–45. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i1.24297>.
- Sugiri, Ahmad. “Proses Islamisasi Dan Percaturan Politik Umat Islam Di Indonesia.” Dalam *Al Qalam*, 11:43–51, 1996. <https://scholar.archive.org/work/hgkng3hvofd5bmescug7tbol4lu/access/wayback/http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/download/630/513>.
- Wahyuni, Tri, Inni Inayati Istiana, dan Ratna Asmarani. “Denda Adat pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 1 (30 Juni 2023): 77–90. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1895>.
- Wijaya, Vinken Geovannissa. “Conceptions of Islam in Indonesian Public Life: a Study of The Nahdlatul Ulama’s Journal Tashwirul Afkar (1997-2016).” *Tashwirul Afkar* 41, no. 2 (30 Desember 2022): 111–36. <https://doi.org/10.51716/ta.v41i2.72>.

- Wijayati, Mufliha. “Jejak Kesultanan Banten di Lampung Abad XVII (Analisis Prasasti Dalung Bojong).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (6 April 2017): 383–420. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.622>.
- Yahya, I., dan Sahidin Sahidin. “Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 2022. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7405>.
- Yulastini, Ela. “Analisis Perkembangan Sejarah Kesultanan Banten pada Masa Pemerintahan Sultan Maulana Yusuf (1570-1580).” *KRINOK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 2, no. 2 (2022): 169–79. <https://doi.org/DOI: 10.22437/krinok.v2i2.25514>.
- Yusilafita, Anisa, dan Tapsir Efendi. “Proses Islamisasi dan Penyebarannya di Nusantara.” *Jurnal pendidikan Tembusai* 7, no. 2 (2023): 4425–34.
- Zakia Al Erza, Rahma, Agus Pahrudin, dan Chairul Anwar. “Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (22 Februari 2024): 85–91. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087>.
- Zarkasi, Ahmad. *Islam dan Budaya Lampung*. Yogyakarta: Idea Press, 2020.